

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran varian baru virus SARS Cov-2 atau lebih dikenal sebagai Covid-19 yang bermula dari Kota Wuhan China semakin meluas ke penjuru dunia sejak diumumkannya penemuan kasus pertama virus Covid-19 pada Januari 2020 (Yip & Perasso, 2021). Tiongkok telah melakukan tindakan awal dengan melakukan lockdown kota Wuhan sejak penyebaran kasus teridentifikasi. Puluhan kasus meninggal dunia juga mulai dilaporkan sejak virus ini terdeteksi di kota Wuhan. Sebanyak 50 juta penduduk di provinsi Hubei, Wuhan dikarantina. Hal ini berdampak secara global, dimana negara - negara di dunia mulai menutup perbatasan mereka atau pemberlakuan lockdown selama tahun 2020 (Dunn & Feuer, 2021).

Penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas menjadikan Eropa menjadi episentrum baru penyebaran virus Covid-19 di luar Asia. Hingga WHO (*World Health Organization*) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Berbagai regulasi ditetapkan oleh banyak negara guna menekan angka penyebaran virus tersebut salah satunya adalah mewajibkan warganya untuk melakukan isolasi mandiri, bulan April 2020 lebih dari setengah populasi umat manusia melakukan isolasi mandiri di rumah untuk menekan angka kasus penyebaran Covid-19 sesuai dengan arahan peraturan yang telah ditetapkan hal ini dilakukan untuk menghindari adanya infeksi baru akibat dari kerumunan (Adiyanto, 2020). Penutupan perbatasan banyak negara serta penerapan kebijakan *lockdown* juga turut menjadi kebijakan

yang ditetapkan banyak negara. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada perekonomian dari tingkat lokal hingga tingkat internasional (Adiyanto, 2020).

Indonesia menyatakan penyebaran virus Covid-19 telah masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, kasus pertama yang terdeteksi adalah 2 WNI yang berhubungan kontak dengan WNA asal Jepang yang terinfeksi Covid-19. Sejak saat itu angka kasus infeksi di Indonesia mulai meningkat secara gradual dan menyebar hingga seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan respon pandemi Covid-19 dengan membentuk Satgas Covid-19. Sama halnya dengan negara negara lain Indonesia juga memiliki permasalahan permasalahan baik sosial dan ekonomi akibat dari penyebaran infeksi Covid-19 yang terus meningkat (KumparanNews, 2021).

Angka penyebaran virus terus meningkat seiring dengan tahun 2020 periode awal ketersediaan obat untuk mengatasi pasien positif COVID-19 masih simpang siur dan belum ditetapkan. Ketersediaan vaksin pada masa ini pun juga masih dalam pengembangan (College of Physicians of Philadelphia, t.thn.). Penemuan dan pengembangan vaksin ini bukanlah akhir dari permasalahan pandemi global. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas dengan permintaan kebutuhan vaksin yang sangat tinggi membuat vaksinasi Covid-19 hanya terpusat pada negara negara pengembang. Selain itu terjadinya nasionalisme vaksin membuat negara produsen akan memprioritaskan penyebaran vaksin ke dalam negeri dan ke negara negara sekutu (Sparke & Levy, 2022).

Terjadinya nasionalisasi dan geopolitik alisasi diplomasi vaksin oleh negara produsen menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan distribusi vaksin Global. Negara produsen vaksin misalnya Rusia dan China memanfaatkan permintaan vaksin global sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan geopolitik. Selain itu negara barat seperti Amerika Serikat dan negara barat lain juga berlomba lomba untuk memberikan bantuan kepada sekutu geopolitiknya. Hingga munculnya istilah *Vaccine Apartheid* yang dilontarkan oleh anti rasis yang melihat adanya kesenjangan dan gap yang besar dalam akses vaksin global khususnya bagi negara negara di benua Afrika (Sparke & Levy, 2022).

Kondisi distribusi vaksin Covid-19 yang terbatas pada tahun tahun pertama pandemi global membuat Indonesia memerlukan strategi yang baik untuk dapat menjalin kerjasama dengan negara produsen vaksin Covid-19. Akhir pertengahan 2020 atau pasca lebaran Idul Fitri kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia melonjak tinggi. Lebih dari setengah juta penduduk Indonesia terindikasi positif Covid-19, jumlah pasien meninggal juga meningkat hingga menyentuh angka 2.312 jiwa pada 1 september 2020. Angka ini bahkan menjadi angka tertinggi penyebaran Covid-19 di asia tenggara. Pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin melalui skema diplomasi vaksin global maupun secara bilateral (KumparanNews, 2021).

Diplomasi vaksin menjadi hal yang penting untuk dikaji berkaitan dengan permasalahan pandemi global. Diplomasi vaksin sendiri mengacu pada seluruh aspek diplomasi kesehatan global terkait dengan penggunaan dan pengiriman vaksin. Dalam penelitiannya Peter J. Hotez (2014) menjelaskan bahwa inti dari

diplomasi vaksin adalah pentingnya intervensi kemanusiaan dan perannya yang telah terbukti dalam mencegah perselisihan dan permusuhan atau bahkan gencatan senjata selama kampanye vaksin berlangsung (Hotez, 2014, hal. 2). Diplomasi vaksin menjadi salah satu cara yang diupayakan negara negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan vaksin di negaranya.

Inggris menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan dari diplomasi vaksin Indonesia. Hubungan diplomasi kedua negara telah berjalan lebih dari 70 tahun. Disisi lain Inggris merupakan salah satu negara yang telah berhasil memproduksi secara massal vaksin Covid-19. Inggris juga merupakan negara asal dari *multinational Corporation* yang bergerak dalam bidang farmasi yaitu AstraZeneca, dimana Astrazeneca menjadi produsen besar dalam distribusi vaksin dunia. Pencapaian Inggris dan AstraZeneca dalam pengembangan vaksin memberikan peran besar Inggris sebagai negara donor stok vaksin dunia. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Inggris. Indonesia juga berharap diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia akan membawa hubungan diplomatik yang lebih serius dengan Inggris kedepannya, khususnya dalam bidang kesehatan (Harizqi, 2022).

Dalam sebuah penelitian terdapat sumber utama dari penelitian terdahulu yang dipakai penulis untuk menggali informasi terkait dengan topik yang diteliti ataupun topik yang memiliki sangkut paut dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang menjadi tinjauan pustaka penulis adalah dari Asep Setiawan, dkk (2022) dengan judul *Upaya Diplomasi Vaksin Indonesia Melalui Jalur Multilateral dan Bilateral*. Dalam penelitian tersebut secara umum dijabarkan upaya - upaya

yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara dan berbagai organisasi internasional ataupun forum internasional dalam mengamankan akses vaksin global. Penulis menyadari bahwa adanya gap penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian tersebut lebih meneliti aktivitas diplomasi vaksin Indonesia secara umum dan tidak meneliti diplomasi Indonesia secara khusus pada suatu negara tertentu.

Kedua, penelitian dari Ramdhan Muhaimin, dkk (2021) *Diplomasi Vaksin Covid-19 dan Budaya Anarki dalam Sistem Internasional*. Dalam penelitian tersebut, lebih banyak meneliti mengenai diplomasi vaksin secara umum berdasarkan pendekatan pola budaya anarki dalam diplomasi vaksin. Topik yang diteliti pada penelitian tersebut dapat menjadi rujukan penulis dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyadari gap dari pada penelitian ini, dimana dalam penelitian ini memiliki fokus upaya yang dilakukan negara negara dalam mengamankan akses vaksin Covid-19 melalui organisasi internasional, yang didalamnya terdapat kolaborasi berbagai negara dalam pemenuhan kebutuhan vaksin global.

Ketiga, penelitian dari Sperke dan Levy (2022) *Competing Responses to Global Inequalities in Access to COVID Vaccines: Vaccine Diplomacy and Vaccine Charity Versus Vaccine Liberty* menjadi landasan adanya ketidakadilan akses vaksin dan masalah yang dihadapi. Kemudian Sperke juga membandingkan antara *vaccine diplomacy*, *vaccine charity* dan *vaccine liberty* sebagai jawaban dari ketidakadilan dalam akses vaksin. Penulis melihat adanya gap dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu dalam penelitian ini akan lebih berfokus bagaimana

ketika solusi tersebut menjawab permasalahan ketidakadilan akses vaksin global. Dan penelitian ini berguna bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam peran diplomasi vaksin dalam usaha sebuah negara dalam akses vaksin Covid-19.

Keempat, dalam penelitian yang dilakukan oleh David S. Fedson (2003) *Pandemic Influenza and the Global Vaccine Supply*. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana keterlibatan politik suatu negara dalam distribusi vaksin global. Penulis menemukan beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana dalam penelitian penulis akan berfokus pada pandemi Covid-19. Fedson juga menjelaskan adanya campur tangan pemerintah dalam distribusi yang dilakukan suatu perusahaan pembuat vaksin terutama yang berada dalam negara.

Kelima, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kickbusch dan Liu (2022) *Global Health diplomacy – reconstructing power and Governance* menjelaskan bagaimana keadaan *Global Health Diplomacy* banyak berkembang dalam dua dekade terakhir. Kickbusch lebih jauh menjelaskan bagaimana peran *power* dalam membentuk posisi, keberhasilan negosiasi dan hasil diplomasi dalam *Global Health diplomacy*. Penelitian Kickbush akan membantu penulis dalam memahami faktor penentu dalam keberhasilan sebuah diplomasi kesehatan di tingkat Global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tulis dapat ditarik rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pelaksanaan

diplomasi vaksin Indonesia dengan Inggris dalam tercapainya kerjasama Biofarma dengan AstraZeneca?

1.3 Tujuan Penelitian

1.4.1 Secara Umum

Penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan atas sebuah tujuan. Dalam hal ini, tujuan penelitian dibagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk pemenuhan mata kuliah skripsi Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Secara Khusus

Penelitian ini secara khusus menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi vaksin bilateral dengan Inggris tahun 2020-2021, dalam penelitian ini dikhususkan terhadap studi kasus keberhasilan diplomasi vaksin Indonesia dengan Inggris sehingga terjadilah kerjasama biofarma dengan AstraZeneca. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional untuk mendapatkan pemahaman dan informasi baru mengenai langkah diplomasi vaksin antara Indonesia dengan Inggris. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi baru terhadap masyarakat umum dan memberikan referensi bagi pengambilan keputusan khususnya dalam menangani pandemi global di kemudian hari. Penulis juga berharap penelitian ini tidak berhenti pada penanganan Covid-19, namun juga

pada penanganan penyakit lain yang masih memerlukan vaksinasi misalnya penanganan HIV. Terakhir, penelitian ini juga dikhususkan sebagai daftar referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep Diplomasi Vaksin

“Science knows no country, because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world” (Pateur, E. Dalam Hotez, 2014). Dalam Penelitiannya Hotez juga menyebut istilah diplomasi sains vaksin (*Vaccine Science Diplomacy*), Hotez berpendapat bahwa diplomasi sains vaksin merupakan perpaduan unik antara diplomasi kesehatan dan diplomasi sains. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa dalam diplomasi sains vaksin banyak melibatkan praktisi ilmuwan yang memiliki pengalaman dalam ilmu vaksin dan juga lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang berkompeten di bidangnya (Hotez, 2014). Dalam konsep diplomasi vaksin tidak selalu dilakukan oleh representatif negara namun juga bisa dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya, perusahaan, maupun organisasi yang bergerak di bidang kesehatan khususnya vaksin. Sebagai bagian dari diplomasi kesehatan, Kickbush dan Lokeny dalam Muhamin, et.al (2021) menjelaskan bahwa pada dasarnya diplomasi kesehatan global adalah ‘sistem organisasi dan komunikasi serta proses negosiasi yang akhirnya membentuk

lingkungan kebijakan global di bidang kesehatan (Muhamin, Hidayat, & Mulyani, 2021).

Negara maju masih memegang peranan besar dalam proses distribusi vaksin global. Konsep diplomasi vaksin yang mengedepankan sisi kemanusiaan lebih banyak digunakan oleh negara berkembang. Penerapan diplomasi vaksin oleh negara berkembang menjadi ajang untuk membuka jalan untuk akses vaksin global. Perwakilan resmi negara berlomba lomba untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya dalam membuka jalan diplomasi vaksin. Dalam aspek lebih luas, perwakilan negara memaksimalkan seluruh kesempatan dialog baik secara tidak resmi, kegiatan melobi, kunjungan maupun aktivitas lainnya dalam berbagai kesempatan (Muhamin, Hidayat, & Mulyani, 2021).

Sistem anarki global membagi kekuatan besar yang pada masing masing negara berusaha untuk bertahan, setiap negara akan mempertahankan dirinya sendiri. Termasuk dalam distribusi vaksin, negara secara alami akan mempertahankan nasionalisme vaksin atau memprioritaskan kepentingan individu dalam mencukupi kebutuhan vaksin di negaranya dibanding pendistribusian secara merata (Kompas.com, 2020). Peran diplomasi Vaksin menjadi salah satu jalan dalam menghadapi dinamika distribusi vaksin global, pelaksanaan diplomasi vaksin selain untuk kepentingan nasional aspek lain seperti kemanusiaan juga turut menjadi topik prioritas dalam diplomasi vaksin. Selain itu kepentingan pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negaranya menjadi implementasi dari aspek kemanusiaan dalam konsep diplomasi vaksin (Muhamin, Hidayat, & Mulyani, 2021).

Sebagai bagian dari diplomasi kesehatan global Ilona Kickbusch dalam Setiawan, et al (2022) dalam diplomasi vaksin dapat dilihat dari tujuh dimensi. Dimensi pertama merupakan negosiasi antara kedua pihak untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan saat berhadapan dengan kepentingan. Dimensi kedua adalah membentuk mekanisme tata kelola dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan. Ketiga adalah untuk membentuk aliansi yang akan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Keempat, upaya membangun dan mengelola hubungan donor dan pemangku kepentingan terkait. Kelima, untuk merespon krisis kesehatan publik baik yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Keenam, sarana meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan dan kesejahteraan. Dan terakhir untuk memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan global (Setiawan, Affianty, & Tanjung, 2021).

Dalam dimensi pertama, negosiasi antara kedua pihak untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan saat berhadapan dengan kepentingan (*Negotiating to promote health in the face of other interests*) dapat diartikan pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan baik itu kepentingan nasional, ideology maupun kepentingan geopolitik, pihak-pihak akan melakukan negosiasi dan mencari solusi untuk dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terlibat maupun semua negara terlebih dalam diplomasi kesehatan global. Dimensi kedua, membentuk mekanisme tata kelola dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan (*Establishing new governance mechanisms in support of health*) dapat diartikan negara-negara yang terlibat membentuk sebuah organisasi baru misalnya UNAIDS, Global Found, GAVI dan lain-lain, sebagai respon dari sebuah tantangan kesehatan

global (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022).

Dimensi ketiga, membentuk aliansi yang akan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan (*Creating alliances in support of health outcomes*) dapat diartikan sebagai pembentukan sebuah aliansi dengan tujuan mendapatkan manfaat atau mencapai sebuah tujuan yang sama. Aliansi ini dapat berupa aliansi politik blok regional seperti EU, *The Caribbean Community* dan *common Market*, yang didalamnya terdapat consensus sebagai penentu arah pada negosiasi atau votes. Dimensi Keempat, upaya membangun dan mengelola hubungan donor dan pemangku kepentingan terkait (*Building and managing donor and stakeholder relations*) dalam relasi diplomasi kesehatan global membutuhkan pembangunan dan mempertahankan hubungan dengan aktor seluas luasnya pada arena global, termasuk didalamnya hubungan khusus dengan negara donor, yayasan swasta, MNC, organisasi maupun individual (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022).

Dimensi kelima, untuk merespon krisis kesehatan publik baik yang sedang terjadi maupun akan terjadi (*Responding to public health crises*) sifat saling bergantung negara negara dan meningkatnya integrasi membawa diplomasi kesehatan global dihadapkan dengan krisis kesehatan publik dalam beberapa waktu dan resiko yang tidak dapat ditentukan. Dimensi Keenam, sarana meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan dan kesejahteraan (*Improving relations between countries through health*) dapat diartikan bahwa diplomasi kesehatan global memiliki peran untuk mendukung program kesehatan pada tingkat global.

Hubungan ini dapat terjadi antar negara maupun actor lain sebagai penguat hubungan antar actor dan membantu membentuk aliansi. Dimensi Ketujuh, memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan global (*Contributing to peace and security*) merupakan usaha mitigasi dari efek yang ditimbulkan konflik bersenjata pada sisi kesehatan. Dapat berupa upaya negosiasi gencatan senjata untuk akses kampanye imunisasi atau intervensi kesehatan lain ketika dibutuhkan (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022).

Dari ketujuh dimensi yang dijabarkan oleh Ilona Kickbusch penulis hanya akan menggunakan empat dari tujuh dimensi. Hal yang mendasari pemilihan tersebut karena dalam dimensi yang dijabarkan oleh Kickbusch lebih menjelaskan konsep diplomasi secara global yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak aktor untuk mencapai tujuan dari kesehatan global . Keempat dimensi tersebut adalah *Negotiation to promote health & well-being in face of other interest, Building and managing donor and stakeholder relations, Responding to public health crises, Improving relations between countries.*

Dalam keempat dimensi yang disebutkan diatas, penjabaran mengenai diplomasi kesehatan bilateral masih memungkinkan untuk dilakukan, pada contoh kasus yang diberikan Kickbusch juga beberapa kali menyinggung adanya usaha kolektif bilateral sehingga penulis menggunakan keempat dimensi diatas untuk menganalisis masalah diplomasi vaksin bilateral.

Kemudian pada dimensi *establishing new government mechanism*, Kickbusch menjelaskan bahwa dalam pembentukan mekanisme pemerintahan baru yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan adalah sebagai hasil dari negosiasi yang dilakukan mulai dari antar aktor bilateral kemudian ditingkatkan negosiasi aktor lainnya misalnya pada WHO, G7, G20 hingga pada tingkat PBB. (Kickbusch, Nikogosian, Kazatchkine, & Kokeny, 2021) penulis beranggapan bahwa penggunaan dimensi ini dalam lingkup bilateral dirasa kurang memiliki dampak terhadap mekanisme pemerintahan baru, karena untuk membentuk tatanan pemerintahan baru pada tingkat bilateral sudah dijelaskan melalui dimensi sebelumnya yaitu *negotiation to promote health*.

Lebih jauh lagi dalam Wolfgang Hein dalam (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022) menjelaskan mengenai mekanisme pemerintahan baru banyak menjelaskan dari sudut pandang tatanan politik internasional, Hein beranggapan tatanan politik internasional mengenai kesehatan kurang dipertimbangkan pada perspektif tradisional. Hein juga menjelaskan bahwa krisis kesehatan global akan berdampak pada negara, kemudian negara akan melakukan hubungan dengan banyak aktor seperti organisasi internasional dan kemudian pada pemerintahan global yang akan bersama sama mengatasi krisis kesehatan di tingkat global.

Pada dimensi *creating alliance* Kickbusch menjelaskan bahwa alasan terbentuknya aliansi adalah karena suatu tujuan yang sama dan bukan sebagian dari tujuan antar anggota aliansi. Kesamaan ini umumnya membentuk blok politik yang mengorganisir usahanya dibawah rangka kerja PBB. Aliansi kesehatan umumnya

terbentuk oleh respon kesehatan tertentu dengan spesifik penyakit tertentu. Karena aliansi dibutuhkan untuk merespon masalah kesehatan yang sulit diselesaikan oleh satu organisasi yang bekerja sendiri atau oleh hubungan dua negara (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022)

Pembentukan blok politik yang memiliki tujuan sama akan memudahkan penerapan kebijakan public untuk dilakukan seluruh aliansi pada level nasional. Tujuan ini tidak akan tercapai tanpa partisipasi dari seluruh anggota, ketidak ikutsertaan anggota aliansi seluruh proses akan tidak efisien bahkan tidak mungkin tercapai (Kickbusch & Liu, Global health diplomacy—reconstructing power and governance, 2022)

Dalam dimensi kontribusi perdamaian dan keamanan, langkah kerja lebih efisien jika dilakukan oleh banyak negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Semakin banyak aktor yang terlibat tujuan ini akan dapat dapat tercapai. Seperti halnya dalam langkah kerja WHO untuk mengatasi epidemic global yang terjadi tahun tahun sebelumnya perlu adanya partisipasi dari banyak negara. Kemudian penerapan embargo atau sanksi ekonomi yang merupakan alat dari kebijakan luar negeri akan efektif jika dilakukan secara kolektif. Embargo ini dilakukan untuk paksaan atas kebaikan kemanusiaan dan kesehatan dalam upaya intervensi (Kickbusch, Nikogosian, Kazatchkine, & Kokeny, 2021).

1.4.2 Konsep *home country government*

Multinational Corporation atau MNC merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi atau jangkauan bisnisnya meliputi lebih dari satu negara atau bahkan

banyak negara di seluruh dunia namun memiliki kantor pusat di negara asalnya. Siregar (2020) menjelaskan bagian bagian dari tubuh MNC dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, salah satu bagian tersebut adalah Induk Perusahaan (*Parent company*). Dalam sistem MNC Induk Perusahaan memegang kendali atas seluruh anak perusahaan yang berada di lintas batas negara. Dalam hal ini Induk Perusahaan memiliki wewenang untuk memiliki dan mengawasi penanaman modal asing di seluruh perusahaannya secara langsung. Induk Perusahaan juga memegang kontrol penuh atas pembuatan keputusan yang akan menentukan tujuan tujuan serta jalannya sistem pengawasan secara keseluruhan. Keputusan ini dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan baru, akuisisi, penentuan negara tempat penanaman modal langsung, banyaknya produksi yang dibuat secara keseluruhan perusahaan, komposisi transfer produksi antar cabang perusahaan, dan penentuan pasar tujuan setiap anak atau cabang perusahaan (Siregar, 2020, hal. 2).

Dalam model bisnis MNC, beberapa MNC menerapkan model model yang berbeda satu sama lain. Salah satu yang dapat dilihat adalah bagaimana sebuah MNC mengendalikan anak perusahaannya melalui kantor pusat atau *Head Quarter* (HQ). HQ memegang peranan penting dalam internal suatu perusahaan. Dalam HQ biasanya terdiri dari Strategi perusahaan, Legal konstitusional, Finance, Human Resource, Public Relation, communication, Branding serta Riset & Development dari sebuah perusahaan MNC secara keseluruhan. Beberapa MNC memberikan otonomi khusus pada anak atau cabang perusahaannya untuk menjalankan fungsi HQ di negara tempat MNC beroperasi atau *Host Country*. Home Country

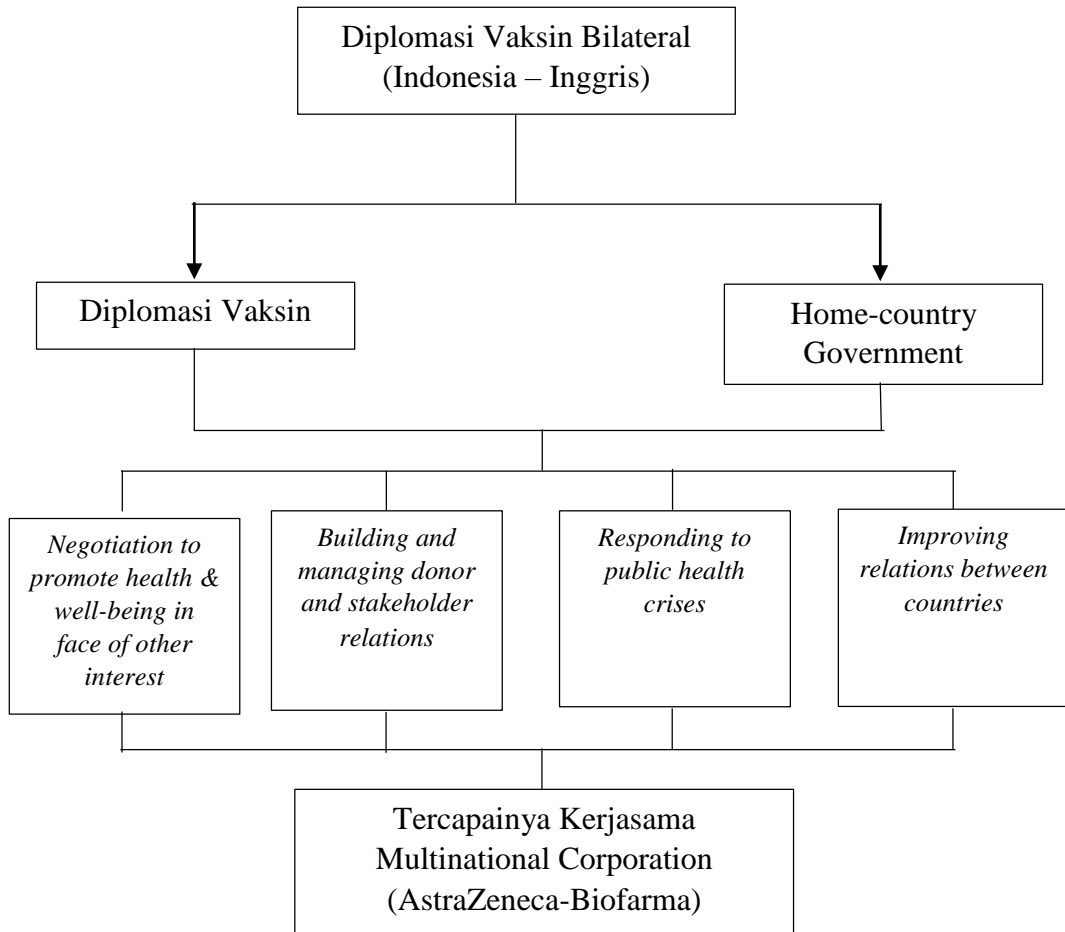
Government mengacu pada pusat dari sebuah MNC atau negara asal dan tempat dimana HQ sebuah MNC berada (Sölvell, 2012, hal. 59).

Negara kedudukan suatu HQ MNC atau home-country dari sebuah MNC turut memberikan intervensi pada sistem dalam MNC. Kedudukan *home-country* ini juga memberikan pengaruh tentang bagaimana sebuah MNC bekerja, misalnya pembatasan sumber daya atau bidang lainnya. Selain itu *home-country* pada beberapa kasus memberikan pengaruh atau intervensi dalam proses pengambilan keputusan pada sebuah MNC. Negara juga dapat menerapkan pembatasan penjualan atau volume ekspor kepada MNC ketika menjalankan bisnisnya. Negara asal akan memberikan banyak intervensi terutama untuk MNC yang bergerak di industri yang dianggap penting oleh negara asal. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial dan politik nasional suatu negara atau bahkan untuk kepentingan politik negara maupun pada urusan luar negeri (Sölvell, 2012).

Intervensi dan citra negara asal tidak dapat dipisahkan dari MNC ketika MNC melakukan ekspansi atau kerjasama di luar negeri. Maka dari itu terkadang MNC akan melihat kembali bagaimana hubungan negara yang akan menjadi mitra kerjasama untuk menghindari konflik atau kerugian. Karena pada umumnya *host-country* akan memberikan reaksi kepada negara asal MNC, baik itu hubungan bilateral maupun antisipasi konflik. Di sisi sebaliknya home-country MNC dengan MNC akan memberikan reaksi jika keadaan host-country tidak stabil. Hal ini dinilai sebagai ketidak stabilan politik yang akan mengancam aktivitas dari MNC (Han, Liu, Gao, & Ghauri, 2018).

1.5 Sintesis Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Dibuat oleh Penulis

Peneliti akan menggunakan dua kerangka teori yaitu konsep diplomasi vaksin dan konsep *home-country government*. Dalam konsep diplomasi vaksin akan digunakan analisis tujuh dimensi diplomasi kesehatan global kemudian dikaitkan dengan konsep *home-country government* sebagai faktor yang mempengaruhi. Dari tujuh dimensi empat dimensi diantaranya memiliki keterkaitan dengan konsep *home-country government* yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu

keempat dimensi tersebut dapat menjelaskan hubungan diplomasi vaksin dalam lingkup kecil atau diplomasi vaksin bilateral. Keempat dimensi tersebut adalah *Negotiation to promote health & well-being in face of other interest*, *Building and managing donor and stakeholder relations*, *Responding to public health crises*, *Improving relations between countries*.

Dalam dimensi *Negotiation to promote health & well-being in face of other interest*, negosiasi dapat dilakukan oleh minimal dua negara dan hal tersebut sejalan dengan diplomasi bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Inggris dan dalam teori home-country government dimana sebuah MNC berasal. Kemudian dalam dimensi *Building and managing donor and stakeholder relations*, terjalinnya hubungan donor dapat terjadi hanya di tingkat negara pemberi donor dan penerima donor yang dalam hal ini Inggris sebagai negara pemberi donor serta negara asal MNC dan Indonesia sebagai negara penerima donor. Dalam dimensi *Responding to public health crises*, Inggris memberikan respon terhadap isu krisis kesehatan publik di Indonesia yang mengalami kenaikan angka kasus Covid-19 dengan memberikan donor vaksin yang didistribusikan oleh AstraZeneca Inggris. Dimensi *Improving relations between countries*, dapat dijelaskan melalui penguatan hubungan antara Inggris dan Indonesia khususnya pada bidang kesehatan dan kerjasama antar MNC.

Ketiga dimensi lain dinilai memiliki relevansi yang sedikit dengan topik bahasan yang dipilih penulis, dimana dalam ketiga dimensi tersebut relasi yang terjadi berada di tingkat global dimana dalam prakteknya melibatkan banyak aktor negara hingga pembentukan aliansi tingkat internasional seperti GAVI, COVAX

dan aliansi kesehatan global lainnya. Misalnya pada dimensi *Establishing new governance mechanisms in support of health*, dimensi ini lebih berfokus pada terjalinya praktik diplomasi multilateral yang melibatkan banyak aktor untuk membentuk suatu tatanan pemerintahan dalam sebuah organisasi baru yang mendukung kesehatan global dan topik ini tidak sejalan dengan analisa yang dilakukan penulis serta teori home-country government asal negara MNC. Lebih lanjut dimensi *Creating alliances in support of health outcomes*, pembentukan sebuah aliansi membutuhkan upaya lebih dari beberapa negara untuk mendukung mendukung terwujudnya kesehatan global yang lebih merata, dimensi ini juga menekankan pada praktik diplomasi multilateral dan hubungan dengan banyak aktor non-state. Dan terakhir pada dimensi *Contributing to peace and security*, dimensi ini bersifat global dimana untuk memberikan kontribusi pada kedamaian dan keamanan kesehatan global diperlukan adanya kontribusi lebih dari dua negara untuk dapat memberikan dampak pada skala yang luas.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan pada latar belakang masalah, kerangka berpikir, dan sintesa pemikiran, penulis berargumen bahwa adanya faktor faktor hubungan diplomatik dan hubungan timbal balik serta keberhasilan diplomasi vaksin antara Indonesia dengan Inggris sehingga terjadinya kerjasama antara AstraZeneca dan BioFarma. Penggunaan analisis dimensi diplomasi kesehatan global dan dikaitkan dengan konsep home-country government menurut penulis adalah hal yang tepat dalam analisa tersebut. Pertama, Inggris dan Indonesia sama sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri sehingga Indonesia memerlukan upaya

negosiasi sehingga diplomasi vaksin perlu dilakukan, cara ini dilakukan melalui donor vaksin, akses pembelian vaksin, dan transfer teknologi antara AstraZeneca dengan BioFarma. Kedua, dalam dimensi membangun dan mengelola hubungan donor, Inggris sebagai negara produsen vaksin melalui AstraZeneca dan kerjasama pengadaan vaksin dimana asistensi dan transfer teknologi terkait distribusi vaksin dan pengembangan vaksin mandiri. Ketiga, dalam dimensi merespon krisis kesehatan, dimana Inggris melihat adanya krisis tingginya angka kasus penyebaran Covid di Indonesia sehingga memberikan support untuk Indonesia, hal ini tidak lepas karena keadaan politik luar negeri Indonesia yang saat pandemi berlangsung aktif menyuarakan pemerataan akses vaksin. Dan yang terakhir, dalam dimensi meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan dan kesejahteraan, Inggris dan Indonesia melakukan kerjasama AstraZeneca dan Biofarma menindaklanjuti mengenai asistensi pengembangan vaksin di Indonesia oleh Biofarma sebagai pertanda keseriusan hubungan diplomatik khususnya dalam kerjasama di bidang kesehatan antar dua negara.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah metode penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai. Merencanakan proses penelitian merupakan bagian penting agar penelitian dapat selesai tepat waktu dan pembahasan berada pada arah yang tepat. Dengan menggunakan metodologi penelitian, penulis dapat memetakan

secara keseluruhan langkah langkah yang akan diambil penulis. Penyusunan metodologi juga berguna untuk memberikan penelitian yang terpercaya dan valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk memecahkan permasalahan yang penulis teliti. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi terkait fenomena yang sedang diteliti sehingga masalah yang dirumuskan harus layak diangkat atau memiliki urgensi, mengandung ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas (Ramadhan, 2021).

Lebih detail penulis menggunakan metode penelitian deskriptif rinci, dalam penelitian ini akan lebih dalam memahami dan memaknai subjek dan menjabarkan semua gejala yang tampak pada suatu peristiwa. Selain itu dalam penelitian ini juga akan memahami apa saja yang ada dibalik sebuah gejala (noumena). Dalam kata lain dalam penelitian ini akan menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa terhadap subjek yang diteliti (Suyitno & Tanzen, 2018).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pemberian batasan waktu menjadi poin penting untuk membatasi penelitian agar fokus penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan tahun penelitian pada tahun 2020. Penulis menilai, langkah diplomasi vaksin telah banyak dilakukan oleh negara negara khususnya Indonesia pada masa awal pandemi Covid-19 Global, meskipun vaksin masih dalam tahap pengembangan pada masa itu. Hal ini dilakukan untuk

mengamankan ketersediaan vaksin ketika vaksin secara resmi telah mendapatkan izin edar oleh WHO. Indonesia tercatat telah melakukan telah melakukan komunikasi dengan Inggris pada awal tahun 2020 untuk mengamankan akses vaksin. (Harizqi, 2022) Kemudian penulis menetapkan batas akhir penelitian pada tahun 2021 atas dasar, kedatangan vaksin AstraZeneca dari Inggris terakhir tercatat terjadi pada akhir tahun 2021 (kompas.com, 2021).

Penelitian ini hanya difokuskan pada tahap tahap yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi vaksin dengan Inggris yang menghasilkan kerjasama antara AstraZeneca dengan perusahaan farmasi milik indonesia yaitu Biofarma.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan agar sebuah penelitian dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan keakuratan penjabaran yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data Elisitasi Dokumen atau pengumpulan data sekunder, dimana penulis memakai sumber sumber sekunder seperti buku buku di perpustakaan, *e-book*, jurnal penelitian, studi literatur, dan juga pemberitaan di media massa yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Pencarian data sekunder dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini (Suyitno & Tanzen, 2018).

Selain itu penulis juga menggunakan data data dari situs resmi pemerintahan baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Amerika Serikat yang dapat

diakses oleh khalayak umum melalui media daring. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tak lupa peneliti juga menggunakan sumber penelitian terdahulu untuk melengkapi penelitian ini. Dan tidak lupa dalam proses pengumpulan data peneliti harus memperhatikan serta mencantumkan asal data yang digunakan (Iskandar, 2008).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Proses Analisis juga menjadi inti dari penelitian yang akan dilakukan penulis. Merupakan proses pengolahan data yang telah penulis kumpulkan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Teknik analisis menjadi poin penting untuk menyajikan data dan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah proses analisis menjadi bagian yang krusial sehingga setelah mengolah informasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif akan menjelaskan suatu permasalahan atau fenomena yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dan disertai dengan penafsiran dengan memaknai perilaku aktor (Mappiare AT, 2009, hal. 80). Penggunaan analisis data kualitatif umumnya digunakan untuk meneliti permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dan terjadi dengan cepat serta memberikan dampak kepada sosial. Untuk menganalisis perilaku sosial sangat tidak mungkin untuk

menggunakan angka seperti pada analisis statistika. Sehingga digunakannya variabel lain seperti sesuai dengan kaidah sosial (Anselm & Corbin, 2003).

Dalam proses analisis data juga meliputi proses seleksi data dan informasi serta pengurangan data yang tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Hasil akhir dalam proses ini akan tersaji data yang telah tersusun secara sistematis dan memiliki informasi yang berguna sesuai dengan topik penelitian serta untuk menarik kesimpulan akhir dalam sebuah penelitian (Miles & Huberman, 1992).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini berguna untuk mempermudah pemahaman dari hasil penelitian, Penulis akan menjabarkan penelitian ini dalam sistematika penulisan seperti berikut

Bab I yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II analisa diplomasi vaksin Indonesia dalam dimensi *Negotiation to promote health & well-being in face of other interest* dan *Building and managing donor and stakeholder relations*

Bab III analisa diplomasi vaksin Indonesia dalam dimensi *Responding to public health crises* dan *Improving relations between countries*.

Bab IV menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.